

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERCERAIAN DENGAN  
ALASAN SUAMI MASIH MENJALIN KOMUNIKASI DENGAN  
MANTAN ISTRI DAN ANAKNYA  
(Studi Putusan Nomor 0613/Pdt.G/2018/PA.Kla)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi  
Syarat-syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1  
dalam Serjana Hukum (S.H)

Oleh :  
**Febry Saputra**  
**1521010071**

**Program Studi: Hukum Keluarga Islam**



**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1441 H / 2020 M**

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERCERAIAN DENGAN  
ALASAN SUAMI MASIH MENJALIN KOMUNIKASI DENGAN  
MANTAN ISTRI DAN ANAKNYA  
(Studi Putusan Nomor 0613/Pdt.G/2018/PA.Kla)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi  
Syarat-syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1  
dalam Serjana Hukum (S.H)

Oleh :  
**Febry Saputra**  
**1521010071**

**Program Studi: Hukum Keluarga Islam**

**Pembimbing Akademik I : Dr. Hj. Linda Firdawaty, S.Ag., M.H.**  
**Pembimbing Akademik II : Frenki, M.Si.**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1441 H / 2020 M**

## ABSTRAK

Dalam perjalanan kehidupan berumah tangga tidak selamanya suami istri dapat mempertahankan kelangsungan rumah tangganya berjalan mulus, tidak sedikit rumah tangga suami istri putus karena perceraian. Mengenai alasan-alasan terjadinya perceraian dielaskan dalam KHI Pasal 116 huruf f bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Berdasarkan putusan Pengadilan Agama Kalianda Perkara Nomor 0613/Pdt.G/2018/PA.Kla. Dalam perkara ini yang menjadi sebab untuk mengajukan cerai talak tersebut adalah karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena pemohon masih sering komunikasi dengan mantan istri dan anaknya. Penelitian ini berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Perceraian dengan Alasan Suami Masih Menjalin Komunikasi dengan Mantan Istri dan Anaknya (Studi putusan Nomor 0613/Pdt.G/2018/PA.Kla)”. Permasalahan dalam skripsi ini adalah apa yang menjadi Pertimbangan Hakim dalam Putusan perkara Nomor 0613/Pdt.G/2018/PA.Kla? dan Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Perceraian dengan Alasan Suami masih menjalin Komunikasi dengan Mantan Istri dan Anaknya?

Penelitian ini merupakan penelitian *Library Research* (Penelitian Pustaka) dan bersifat *deskriptif analitik*. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data Primer, Sekunder, dan Tersier. Metode pengumpulan data yaitu dengan dokumentasi dan studi pustaka. Selanjutnya, metode pengolahan data dengan cara, pemeriksaan data, penandaan data, dan rekonstruksi data. Adapun metode analisis data yang peneliti gunakan adalah metode kualitatif. Peneliti menggunakan metode berpikir deduktif.

Hasil penelitian skripsi ini adalah Pertimbangan hakim dalam permohonan cerai talak yang diajukan tersebut yaitu hakim menggunakan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menegaskan bahwa dalam perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebagaimana Pasal 19 huruf f dapat diterima apabila telah cukup jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri.

Perceraian yang dilatar belakangi karena suami masih menjalin komunikasi dengan mantan istri dan anaknya, boleh seorang suami tetap menjalin komunikasi dengan mantan istri dan anaknya dalam lingkup kepentingan tertentu, seperti memberi nafkah, maskan dan kiswah (tempat tinggal dan pakaian) kepada bekas istri selama dalam iddah dan biaya hadhanah untuk anaknya sampai pada usia 21 tahun. Komunikasi yang dilakukan suami adalah dalam rangka memenuhi kewajibannya dalam menafkahi anaknya. Namun, akibat komunikasi tersebut timbul prasangka yang saling menuduh satu sama lain diantara keduanya, tuduhan yang terus menerus tersebutlah yang menimbulkan perselisihan dan percekcoakan antara suami dan istri sehingga menyebabkan terjadinya perceraian. Jika ditinjau dari hukum Islam boleh dilakukan untuk menghindari kemafsadatan yang lebih besar. Perceraian adalah solusi terbaik bagi rumah tangga tersebut.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: Jl. Letkol Hi. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung 35131 Telp. (0721) 783260

**PERSETUJUAN**

Tim pembimbing, setelah mengoreksi dan memberikan masukan-masukan secukupnya, maka skripsi saudara:

Nama : **Febry Saputra**

NPM : **1521010071**

Fakultas : **Syari'ah**

Jurusan : **Ahwal Al-Syakhsiyah**

Judul : **ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP  
PERCERAIAN DENGAN ALASAN SUAMI MASIH  
MENJALIN KOMUNIKASI DENGAN MANTAN  
ISTRI DAN ANAKNYA (Studi Putusan Nomor  
0613/Pdt.G/2018/PA.Kla)**

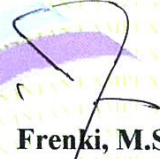
**DISETUJUI**

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

  
**Dr. Hj. Linda Firdawaty, S.Ag., M.H.**  
**NIP.197112041997032001**

  
**Frenki, M.Si.**  
**NIP.198003152009011017**

**Mengetahui**

**Ketua Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah**

  
**H. Rohmat, S.Ag., M.H.I**  
**NIP: 197409202003121003**





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat: Jl. Letkol Hi. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung 35131 Telp. (0721) 783260

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul : **ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERCERAIAN DENGAN ALASAN SUAMI MASIH MENJALIN KOMUNIKASI DENGAN MANTAN ISTRI DAN ANAKNYA** (Studi Putusan Nomor 0613/Pdt.G/2018/PA.Kla). Disusun oleh: **FEBRY SAPUTRA**, NPM: **1521010071**, Fakultas: **Syari'ah**, Jurusan: **Ahwal Syakhsiyyah** Telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syari'ah pada hari/tanggal : **Jum'at, 7 Februari 2020**.

**TIM MUNAQOSYAH**

**Ketua : Dr. H. Khoirul Abror, M.H**

**Sekretaris : Erik Rahman Gumiri, M.H**

**Penguji Utama : Dr. Liky Faizal, S.Sos., M.H**

**Penguji Pendamping I: Dr. Hj. Linda Firdawaty, S.Ag., M.H**

**Penguji Pendamping II : Frenki, M.Si**

**Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah**

**Dr. H. Khairuddin, M.H**  
NIP. 196210221993031002

## MOTTO

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا  
إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٥٥﴾

Artinya: Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. (Q.S. An-Nisa (4): 35)



## **RIWAYAT HIDUP**

Nama Lengkap Febry Saputra dilahirkan di Hanakau , Kecamatan Sukau, Kabupaten Lapung Barat, pada tanggal 26 Februari 1997. Buah hati dari pasangan bapak Zainul dan ibu Rubiati. Merupakan anak ke 1 dari 3 bersaudara. Pendidikan formal yang pernah ditempuh adalah sebagai berikut:

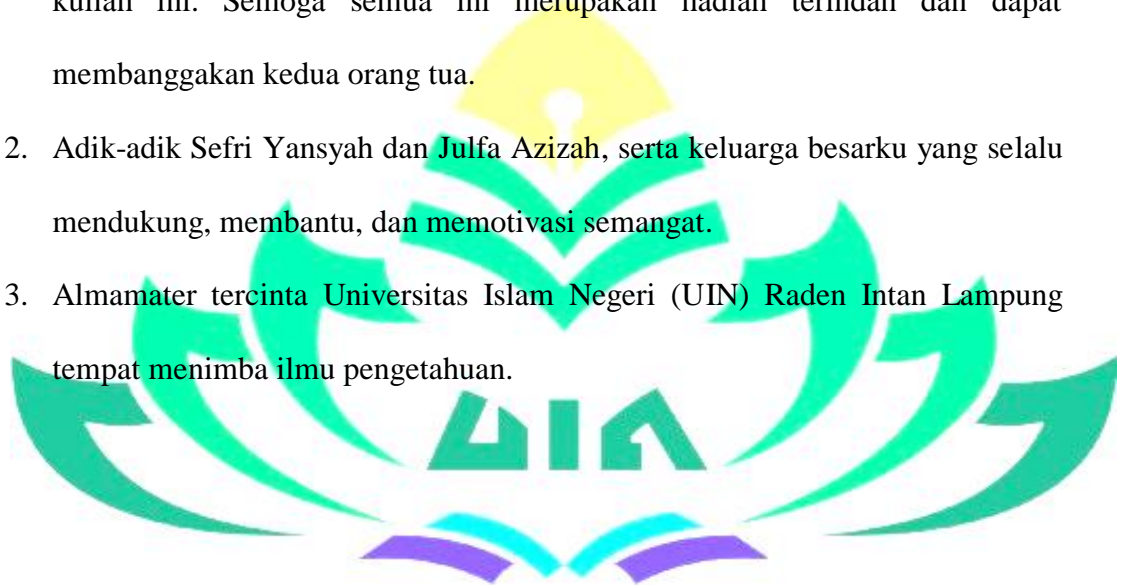
1. Sekolah Dasar Negeri 1 Hanakau tamat tahun 2009
2. Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Liwa tamat tahun 2012
3. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Liwa tamat tahun 2015.
4. Pada tahun akademik 2015/2016 mengikuti Program Strata 1 pada Fakultas Syari'ah Jurusan Ahwal Al-syakhshiyah di UIN Raden Intan Lampung.



## PERSEMBAHAN

Sebagai ungkapan cinta, sayang, dan rasa hormat yang tak terhingga skripsi ini dipersembahkan untuk:

1. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Zainul dan Ibunda Rubiati yang telah melindungi, mengasuh, menyayangi, mendidik saya dari sejak kandungan hingga dewasa, serta senantiasa mendo'akan dan sangat mengharapkan keberhasilan. Dan berkat do'a restu keduanya sehingga dapat menyelesaikan kuliah ini. Semoga semua ini merupakan hadiah terindah dan dapat membanggakan kedua orang tua.
2. Adik-adik Sefri Yansyah dan Julfa Azizah, serta keluarga besarku yang selalu mendukung, membantu, dan memotivasi semangat.
3. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung tempat menimba ilmu pengetahuan.





## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan petunjuk dan limpahan rahmat-nya, sehingga dapat terselesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Perceraian Dengan Alasan Suami Masih Menjalin Komunikasi Dengan Mantan Istri dan Anaknya (Studi Putusan Nomor 0613/Pdt.G/2018/PA.Kla).”

Shalawat beriringan salam semoga tetap tercurahkan kepada Rasulullah SAW, kepada keluarga, sahabat serta seluruh umat yang senantiasa mengikuti ajaran agama yang membawa semua umat menuju kebahagiaan baik kebahagiaan dunia maupun kebahagiaan akhirat. Penyusun skripsi ini merupakan bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan pada program strata satu (S1) di Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.

Selesainya penyusunan skripsi ini, tentu saja tidak merupakan hasil usaha penulis secara mandiri, sebab keterlibatan sebagian pihak sangat memberikan arti penting dalam rangka terselesainya usaha penyusunan ini. Baik itu yang berupa motivasi, bantuan pemikiran, materil dan moril, serta spiritual. Untuk itu ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya penulis sampaikan kepada:

1. Rektor UIN Raden Intan Lampung Prof. Dr. H. Moh. Mukri., M. Ag. Beserta staf dan jajaranya.
2. Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Dr. H. Khairuddin, M.H Serta para wakil Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung, yang telah mencurahkan perhatiannya untuk meberikan ilmu pengetahuan dan wawasan kepala penulis.

3. Ketua Prodi Al-Ahwal Al-Syakhiyah, bapak H. Rohmat, S.Ag.,M.H.I Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung, yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Pembimbing I: Hj. Linda Firdawaty, S.Ag., M.H. Pembimbing II: Frenki, M.Si. yang telah menyediakan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan.
5. Seluruh dosen, asisten dosen, dan pegawai Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung, yang telah membimbing, membantu penulis selama mengikuti perkuliahan.
6. Pimpinan Perpustakaan dan karyawan baik perpustakaan Fakultas maupun Institut, yang telah memberikan dispendasi dan bantuannya dalam meminjamkan buku-buku sebagai literatur dalam skripsi ini.
7. Pengadilan Agama Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, yang telah memberikan waktu kepada penulis untuk melakukan penelitian.
8. Wanita special yang telah menemani dan memberi semangat dalam menyelesaikan skripsi ini Intan Fatrisia Alse.
9. Teman-teman ku angkatan 2015 jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah yang telah memberikan semangat dan doa dalam skripsi ini, yang namanya tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Bandar lampung, 17 Desember 2019  
Penulis,

Febry Saputra

## DAFTAR ISI

	halaman
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>

## BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul.....	1
B. Alasan Memilih Judul.....	2
C. Latar Belakang Masalah .....	3
D. Fokus Penelitian .....	9
E. Rumusan Masalah.....	9
F. Tujuan Penelitian.....	9
G. Signifikansi Penelitian .....	10
H. Metode Penelitian .....	10

## BAB II LANDASAN TEORI

A. Landasan Teori .....	15
1. Perceraian menurut Hukum Islam .....	15
a. Pengertian dan Ketentuan tentang Perceraian dalam Hukum Islam .....	15
b. Dasar Hukum dan Hukum Perceraian.....	19
c. Alasan dan Faktor Penyebab Perceraian .....	22
d. Akibat Perceraian Terhadap Istri dan Anak .....	26
2. Perceraian menurut Hukum Positif.....	30
a. Pengertian dan Dasar Hukum Perceraian.....	30
b. Alasan untuk Melakukan Perceraian.....	31
c. Prosedur Perceraian.....	33
d. Akibat Perceraian Terhadap Istri dan Anak .....	37
3. Komunikasi dalam Keluarga .....	38
a. Pengertian Komunikasi dalam Keluarga.....	38
b. Proses Komunikasi.....	39
c. Tujuan Komunikasi .....	40
d. Macam-macam Komunikasi .....	41
B. Tinjauan Pustaka .....	44

### **BAB III PUTUSAN NOMOR 0613/Pdt.G/2018/PA.Kla**

A. Identitas Para Pihak.....	46
B. Deskripsi Duduk Perkara .....	47
C. Permohonan Gugatan.....	50
D. Pertimbangan Hakim .....	77
E. Amar Putusan .....	91

### **BAB IV ANALISA DATA**

A. Pertimbangan Hakim dalam Putusan perkara Nomor 0613/Pdt.G/2018/PA.Kla.....	92
B. Analisis Hukum Islam terhadap Perceraian dengan Alasan Suami masih menjalin komunikasi dengan Mantan Istri dan Anaknya.....	95

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	99
B. Saran .....	100

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**





## BAB I PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Demi memudahkan pemahaman tentang judul skripsi ini agar tidak menimbulkan kekeliruan dan kesalah pahaman, maka peneliti terlebih dahulu akan menguraikan secara singkat istilah-istilah yang terdapat dalam skripsi yang berjudul: **“Analisis Hukum Islam Terhadap Perceraian Dengan Alasan Suami Masih Menjalin Komunikasi Dengan Mantan Istri Dan Anaknya (Studi Putusan Nomor: 0613/Pdt.G/2018/PA.Kla)”**.

Uraian istilah-istilah yang terdapat dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

- Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dsb) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dsb).<sup>1</sup>
- Hukum Islam adalah peraturan-peraturan yang dirumuskan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul, tentang tingkah laku mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku mengikat bagi semua pemeluk agama Islam.<sup>2</sup>
- Perceraian adalah sebutan untuk melepaskan ikatan pernikahan, dalam istilah *fiqh* perceraian dikenal dengan istilah “*talaq*” atau “*furqah*”. Talaq

---

<sup>1</sup>Dapertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi Keempat, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 58.

<sup>2</sup>Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media, 2001), h. 23.

berarti membuka ikatan atau membatalkan perjanjian. Sedangkan *furqah* berarti bercerai yang merupakan lawan kata dari berkumpul.<sup>3</sup>

- Komunikasi adalah satu bentuk interaksi manusia yang bisa mempengaruhi manusia lainnya satu sama lain yang dilakukan baik secara sengaja ataupun tidak sengaja, dan tidak terbatas pada bentuk komunikasi verbal saja, namun juga bisa lewat bentuk ekspresi muka, seni, lukisan dan teknologi.

Berdasarkan penjelasan beberapa istilah di atas, dapat ditegaskan bahwa maksud dari judul skripsi ini adalah menganalisis isi putusan Pengadilan Agama Kalianda tentang perceraian dengan alasan suami masih menjalin komunikasi dengan mantan istri dan anaknya.

## **B. Alasan Memilih Judul**

Ada beberapa alasan yang menarik, sehingga penulis terdorong untuk membahas masalah ini yaitu:

1. Secara Objektif, permasalahan ini menarik untuk dikaji. Hal ini mengingat Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang pada dasarnya mempersulit terjadinya perceraian yang menjaga nilai-nilai luhur perkawinan, namun pada realitanya angka perceraian semakin meningkat di antaranya karena adanya pihak ketiga, sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

---

<sup>3</sup>Soedikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), h.175.

2. Secara Subjektif, untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang hal yang berkaitan dengan permasalahan perceraian, dan pokok bahasan ini relevan dengan disiplin ilmu yang peneliti pelajari di Fakultas Syariah, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah.

### C. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia terutama seorang muslim yang memasuki kehidupan perkawinan, selain mengikuti sunah rasulnya, juga tidak terlepas dari tujuan untuk mendapatkan kebahagiaan. Dalam kamus istilah fiqh (menurut syara') hakikat nikah itu ialah suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. Akad ini kemudian melahirkan hak dan kewajiban antara keduanya.<sup>4</sup> Perkawinan itu dapat diharapkan menjadi suatu perkawinan yang bahagia apabila pelaku perkawinan tersebut memiliki rasa saling mencintai serta menyayangi yang direalisasikan dalam bentuk melaksanakan segala bentuk kewajiban masing-masing. Perkawinan seperti inilah yang dapat diharapkan membawa kebahagiaan dan ketentraman<sup>5</sup>. Dalam hal ini Allah SWT berfirman dalam surat Al-Rum (30): 21

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ  
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu

<sup>4</sup>Khoirul Abror, Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur, ( Yogyakarta: DIVA Press, 2019), h. 14

<sup>5</sup>Abdur Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 36

rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”<sup>6</sup>

Perjalanan dalam sebuah perkawinan tidaklah selalu tenang dan menyenangkan. Adakalanya kehidupan perkawinan begitu rumit dan memusingkan. Dalam kehidupan rumah tangga sering terjadi percekocokan akibat ulah istri atau suami akan tetapi, hendaklah percekocokan itu tidak dibiarkan menjadi besar. Jika dalam suatu perkawinan terdapat konflik yang berkepanjangan, dimana apabila perkawinan tersebut tetap dilanjutkan akan menimbulkan hal-hal yang dapat merugikan anggota keluarga, maka jika hal itu terjadi perkawinan tersebut dapat diputus dengan cara perceraian.<sup>7</sup>

Adapun bentuk-bentuk perceraian dapat berupa cerai talak ataupun cerai gugat. Dengan demikian hak untuk memutuskan perkawinan melalui perceraian tidak lagi menjadi monopoli suami, tetapi istri juga diberi hak untuk mengajukan gugat cerai. Namun untuk mengajukan gugat cerai tersebut harus ada cukup alasan (alasan yang jelas) yang mendukung diajukannya gugatan tersebut.

Mengenai putusan perkawinan, Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mengaturnya dalam Bab VIII Pasal 38. Pasal ini menyatakan perkawinan dapat putus karena: kematian, perceraian, dan keputusan pengadilan. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) diatur lebih rinci

---

<sup>6</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahannya, (Jakarta: Karya Insan Indonesia, 2002), h. 406.

<sup>7</sup>Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1982), h. 10.



mulai dari sebab-sebab perceraian, tata cara perceraian dan akibat hukumnya dalam Bab XVI Pasal 113 sampai dengan Pasal 162<sup>8</sup>.

Pasal 113 KHI sama dengan Pasal 38 UU Perkawinan. Pasal 114: “ Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian”. Pasal 115 KHI menegaskan bunyi Pasal 39 ayat (1) sesuai dengan konsep KHI yaitu untuk orang Islam: “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.

Pada dasarnya perceraian merupakan jalan terakhir yang ditempuh setelah ikhtiar dan segala daya upaya yang telah dilakukan guna memperbaiki kehidupan perkawinan dan ternyata tidak ada jalan lain lagi selain jalan perceraian.

Talak atau perceraian merupakan alternatif terakhir, sebagai “pintu darurat” yang boleh ditempuh, manakala bahtera kehidupan rumah tangga tidak dapat lagi dipertahankan keutuhan dan kesinambungannya. Sifatnya sebagai alternatif terakhir, Islam menunjukan agar sebelum terjadinya talak atau perceraian, ditempuh usaha-usaha perdamaian antara kedua belah pihak, baik hakam dari kedua belah pihak, atau melalui langkah-langkah lainnya.

Setidaknya ada empat kemungkinan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga, yang dapat memicu timbulnya keinginan untuk memutus/terputusnya perkawinan, yaitu:

1. Terjadinya nusyuz dari pihak istri

---

<sup>8</sup>Sri Soesilowaty Mahdi, Surini Ahlan Sjarief dan Akhmad Budi Cahyono, *Hukum Perdata (Suatu Pengantar)*, (Jakarta: Gitama Jaya, 2005), h. 61.

2. Terjadinya nusyuz dari pihak suami
3. Terjadinya perselisihan atau percekocokan antara suami dan istri, yang dalam Al-Qur'an sering disebut syiqaq
4. Terjadinya salah satu pihak melakukan perbuatan zina atau fakhisyah, yang menimbulkan saling tuduh-menuduh antara keduanya

Menurut hukum adat yang menjadi sebab terjadinya suatu perceraian adalah:

1. Perzinaan,
2. Tidak mempunyai nafkah,
3. Penganiayaan,
4. Cacat tubuh, dan
5. Perselisihan.

Mengenai alasan-alasan terjadinya perceraian dalam Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 sama dengan Pasal 116 KHI hanya saja dalam Pasal 116 KHI terdapat dua poin tambahan. Dalam pasal-pasal tersebut disebutkan pada huruf (d) salah satu alasan terjadinya perceraian adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Alasan atau alasan-alasan artinya, perceraian dapat diajukan berdasarkan satu alasan saja atau dapat pula berdasarkan lebih dari satu alasan atau kumulasi dari yang ditentukan tersebut. Alasan atau alasan-alasan itulah yang nantinya akan diuji oleh majelis hakim dalam agenda pembuktian di persidangan<sup>9</sup>. Perselisihan antara pasangan dalam

---

<sup>9</sup>Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, Cetakan Kedua, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2016), h. 153.

rumah tangga merupakan salah satu masalah utama dalam masyarakat. Dampaknya terentang mulai dari dampak bagi individu korban, bagi pihak keluarga, bagi masyarakat, sampai terhadap negara.

Berdasarkan uraian di atas, Pengadilan Agama Kalianda telah memutuskan Perkara Nomor 0613/Pdt.G/2018/PA.Kla pada tanggal 06 september 2018 Masehi, Bertepatan dengan tanggal 25 Dzulhijjah 1439 Hijriah, dengan Pemohon yang berumur 41 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Selatan, dan Termohon yang berumur 25 tahun, Agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Selatan. Awalnya Pemohon dan Termohon melangsungkan perkawinan pada tanggal 22 September 2016. Semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Juni tahun 2017 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, yaitu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain karena setiap kali Pemohon mendapat pesan singkat (SMS) dari mantan istri Pemohon yang isinya pemohon diminta memberikan jatah nafkah bulanan yang diperuntukkan bagi anak kandung Pemohon dari mantan istri sebelumnya. Setiap anak kandung Pemohon dari istri sebelumnya menginap, Termohon keberatan, kemudian selalu ribut bahkan pernah bilang ke Bapak kandung Pemohon meminta untuk di panggilkan Pak Lurah .

Perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon mulai April 2018 sudah tidak tinggal serumah. Termohon juga membawa

sepeda motor dan mesincuci yang dibeli oleh Pemohon dan Termohon tidak mau menyapa keluarga Pemohon lagi. Melihat keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi.

Dalam perkara ini yang menjadi sebab untuk mengajukan cerai talak tersebut adalah karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena pemohon masih sering komunikasi dengan mantan istrinya, anak-anak pemohon dari istri yang pertama serta keluarga Pemohon tidak menyukai Termohon.

Sisi etika moral syari'ah yang di dalamnya mengajarkan tentang kasih sayang dan amanah yang harus diemban dalam institusi perkawinan, tentu perselisihan dan pertengkaran bertentangan dengan tujuan pernikahan, yakni membina rumah tangga yang aman, tentram, dan damai, yang melindungi tujuan-tujuan syari'ah.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum mengenai perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga menurut tinjauan hukum Islam. Penulis melakukan penelitian hukum normatif dengan memilih judul: "Analisis Hukum Islam Terhadap Perceraian dengan Alasan Suami Masih Menjalin Komunikasi dengan Mantan Istri dan Anaknya (Studi putusan Nomor 0613/Pdt.G/2018/PA.Kla)".



#### **D. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka fokus penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pertimbangan Hakim dalam Putusan perkara Nomor 0613/Pdt.G/2018/PA.Kla.
2. Tinjauan Hukum Islam terhadap Perceraian dengan alasan Suami masih menjalin Komunikasi dengan mantan Istri dan Anaknya.

#### **E. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang dan focus penelitian di atas, maka peneliti dapat merumuskan beberapa pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi Pertimbangan Hakim dalam Putusan perkara Nomor 0613/Pdt.G/2018/PA.Kla?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Perceraian dengan Alasan Suami masih menjalin Komunikasi dengan Mantan Istri dan Anaknya?

#### **F. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap perceraian dengan alasan suami masih menjalin komunikasi dengan mantan istri dan anaknya. Serta, untuk mengetahui pertimbangan Hakim yang digunakan dalam putusan perkara Nomor 0613/Pdt.G/2018/PA.Kla.

## G. Signifikasi Penelitian

Adapun signifikasi atau manfaat dari penelitian adalah diharapkan berguna untuk:

- a. Secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah kontribusi pengetahuan khususnya mengenai masalah perceraian, dan juga pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara perceraian sekaligus memperkaya teori kepustakaan hukum khususnya hukum Islam.
- b. Secara Praktis, sebagai pelaksana tugas akademik, yaitu untuk melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

## H. Metode Penelitian

Dalam rangka penelitian skripsi ini, peneliti menggunakan metode untuk mempermudah dalam pengumpulan, pembahasan, dan menganalisa data.

Adapun metode yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Ditinjau dari jenisnya, penelitian ini merupakan penelitian *Library Research* (Penelitian Pustaka) yaitu suatu penelitian yang difokuskan terhadap bahasan-bahasan pustakaan yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas, yaitu dengan membaca buku-buku, literatur dan menelaah

dari berbagai macam teori dan pendapat yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>10</sup>

#### b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitik* yaitu penelitian berusaha memaparkan secara sistematis materi-materi pembahasan dari berbagai sumber untuk kemudian dianalisis dengan cermat guna memperoleh hasil sebagai kesimpulan dari kajian tentang perceraian dengan alasan suami masih menjalin komunikasi dengan mantan istri dan anaknya.<sup>11</sup>

### 2. Sumber Data

Sesuai dengan dengan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, maka yang menjadi sumber data dalam skripsi ini adalah:

#### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu bahan-bahan yang mengikat data bahan utama dalam membahas suatu permasalahan. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah al-Quran, Hadis dan salinan putusan Nomor 0613/Pdt.G/2018/PA.Kla di Pengadilan Agama Kalianda.

#### b. Sumber Data Sekunder

Sumber Data Sekunder yaitu bahan yang menjelaskan bahan buku primer, seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian, pendapat para pakar yang mendukung tema pembahasan atau hasil dari karya ilmiah.<sup>12</sup>

Adapun yang berkaitan dengan pembahasan seperti, sumber data yang

---

<sup>10</sup>Ranny Kautur, *Metode Penelitian untuk Penelitian Skripsi dan Tesis*, (Bandung : Taruna Grafika, 2000), h. 38.

<sup>11</sup>Cholid Narbuko, Abu Ahmad, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h. 45.

<sup>12</sup>Nasution, *Metode Penelitian Naturalistic Kualitatif*, (Bandung: Tarsio, 1998), h. 26.

diperoleh dari buku-buku dan literatur tentang perkawinan, KHI (Kompilasi Hukum Islam) dan Peraturan perundang-undangan berupa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

c. Sumber Data Tersier

Sumber Data Tersier yaitu bahan tambahan atau bahan yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa Ensiklopedia hukum Islam, kamus hukum, dan beberapa jurnal hukum.

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dari sumber data, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Metode Dokumentasi, yaitu metode untuk memperoleh data dengan cara mempelajari dokumen-dokumen, berupa berkas-berkas yang berhubungan dengan topik penelitian.<sup>13</sup>
- b. Studi Pustaka, yaitu metode dengan cara mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti dokumen, buku, catatan dsb.

4. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data adalah melakukan analisis terhadap data dengan metode dan cara-cara tertentu yang berlaku dalam penelitian.<sup>14</sup> Pengolahan data umumnya dilakukan dengan cara:

---

<sup>13</sup>Sutrisno Hadi, *Prosedur Penelitian Praktek, Edisi II*, ( Rinika Cipta, Jakarta, 1991), h. 202.

<sup>14</sup>*Ibid.*



a. Pemeriksaan data (*Editing*)

Yaitu mengoreksi data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, dan sesuai atau relevan dengan masalah yang dikaji.<sup>15</sup> Dalam hal ini peneliti meninjau kembali hasil data yang terkumpul melalui studi pustaka dokumen apakah sudah lengkap dan relevan, jelas dan tidak berlebihan tanpa kesalahan.

b. Penandaan data (*Coding*)

Yaitu memberikan catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data (Al-Qur'an, Hadis, buku-buku literatur, dan data lain yang berkenaan dengan pembahasan).<sup>16</sup> Dalam hal ini peneliti mengklarifikasi data sesuai masing-masing pokok bahasan dengan tujuan untuk menyajikan data secara sempurna dan untuk memudahkan analisa.

c. Rekonstruksi data

Yaitu menyusun ulang secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami sesuai dengan permasalahan, kemudian ditarik kesimpulan sebagai tahap akhir dalam proses penelitian.<sup>17</sup>

5. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan cara untuk menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber.<sup>18</sup> Adapun metode analisis data yang peneliti gunakan adalah metode kualitatif. Peneliti menggunakan metode berpikir deduktif yaitu analisis yang berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum untuk mendapatkan kesimpulan khusus, dalam hal ini al-Qur'an, hadis,

---

<sup>15</sup>Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), h. 128.

<sup>16</sup>*Ibid*, h.126.

<sup>17</sup>Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), h.107.

<sup>18</sup>Lexi. J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), h. 190.

Undang-undang No.1 Tahun 1974, KHI (Kompilasi Hukum Islam) atau buku- buku serta literatur lainnya yang berhubungan dengan masalah yang penulis akan bahas dalam penelitian ini.



## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **1. Perceraian Menurut Hukum Islam**

##### **a. Pengertian dan Ketentuan tentang Perceraian dalam Hukum Islam**

Perceraian dalam Islam dikenal dengan istilah talak, semakna dengan kata talak itu adalah *al-irsâI* atau *tarku*, yang berarti melepaskan dan meninggalkan. Yaitu melepaskan tali perkawinan mengakhiri hubungan suami isteri.<sup>1</sup> Talak bukanlah sebuah larangan, namun sebagai pintu terakhir dari rumah tangga, ketika tidak ada jalan keluar lagi.

Secara etimologi berarti, membuka ikatan, baik ikatan nyata seperti ikatan kuda atau ikatan tawanan atau ikatan ma'nawi seperti ikatan pernikahan yaitu antara suami dan istri. Menurut syara' yang dimaksud talak ialah memutuskan tali perkawinan yang sah, baik seketika atau dimasa mendatang oleh pihak suami dengan mengucapkan kata-kata tertentu atau cara lain yang menggantikan kedudukan kata-kata tersebut.

Ikatan pernikahan berakhir dengan perceraian, apakah disebabkan oleh sikap suami atau sikap istri. Pasangan suami istri yang tidak cocok lagi untuk melanjutkan rumah tangganya dan telah menerima untuk bercerai, telah memberikan pendapat yang negative bukan hanya terhadap anak-anak, bahkan termasuk mantan suami istri serta terhadap masyarakat.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat II*, (Bandung: CV. Pustaka Setia 1999), h. 9.

<sup>2</sup>Darmawati, "Perceraian Dalam Perspektif Sosiologi", *Jurnal Wawasan Keislaman Uin Alaudin*, Vol. 11 No. 1, 2017. H. 1

Imam Nawawi dalam bukunya *tahdzib* memiliki pemahaman bahwa talak adalah tindakan orang berkuasai terhadap suami yang terjadi tanpa sebab kemudian memutuskan nikah. Lafal talak telah ada sejak zaman Jahiliah. Syara' datang untuk menguatkannya bukan secara spesifik atas umat ini. penduduk jahiliah menggunakannya ketika melepas tanggungan, tetapi dibatasi tiga kali.

Putusnya sebuah perkawinan tidak hanya terjadi melalui talak yang dijatuhkan oleh seorang suami, perkawinan dapat putus melalui sebab lain di antaranya sebagai berikut:

a. Talak

Talak dibagi kedalam dua macam, sebagai berikut:

- 1) *Talak Raj'i*, adalah suatu talak dimana suami memiliki hak untuk meurujuk isteri tanpa kehendaknya. Dan talak raj'i ini diisyaratkan pada isteri yang telah digauli. Dengan demikian, yang dimaksud dengan talak raj'i adalah talak yang dijatuhkan oleh suami kepada isteri sebagai talak satu atau dua, yang diikrarkan di depan sidang pengadilan, dan suami diperbolehkan meruju'nya bila masih dalam masa iddah, tanpa diharuskan nikah baru.<sup>3</sup>
- 2) *Talak Ba'in* secara etimologi, ba'in adalah nyata, jelas, pisah atau jatuh, yaitu talak yang terjadi karena isteri belum digauli oleh suami, atau karena adanya bilangan talak tertentu (tiga kali), dan atau karena

---

<sup>3</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Pernikahan Islam*, (Yogyakarta: UII Pres, 2004), h. 80.

adanya penerimaan talak tebus (*khulu*), meskipun ini masih diperselisihkan fuqaha, apakah *khulu'* ini talak atau fasah.<sup>4</sup>

Talak ba'in dibagi menjadi dua macam:

- a) Ba'in sugra adalah talak yang menghilangkan hak-hak rujuk dari bekas suaminya, tetapi tidak menghilangkan hak nikah baru (*tajdid an-nikah*) kepada bekas isterinya.
- b) *Ba'in kubra* adalah talak yang mrnghilangkan hak suami untuk menikah kembali kepada isteri nya, kecuali kalau bekas isterinya telah kawin dengan laki-laki lain dan telah berkumpul sebagai mana suami isteri secara nyata dan sah.

#### b. *Khulu'*

*Khulu'* berasal dari kata "*khulu' al-saub*" yang berarti melepaskan atau mengganti pakaian pada badan, karena seorang wanita adalah pakaian bagi laki-laki, dan juga sebaliknya. *Khulu'* adalah salah satu bentuk perceraian dalam Islam yang berarti manghilangkan atau mengurungkan akad nikah dengan kesediaan isteri membayar uang '*iwad*' atau uang pengganti kepada suami dengan pernyataan cerai atau *khulu*.

#### c. *Fasakh*

*Fasakh* menurut bahasa berarti memisahkan atau memutuskan. Adapun fasakh menurut istilah adalah memutuskan pernikahan berdasarkan syarat-syarat tertentu dengan syariat.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup>Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah*, Terj. Ansori Umar Sitanggal "Fiqh Wanita", (Semarang: CV Asy- Syifa, 1986), h. 411.

<sup>5</sup>Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), h. 197.



d. *Li'an*

*Li'an* secara etimologi berarti laknat atau kutukan. Sementara secara terminologi adalah sumpah yang diucapkan oleh suami ketika menuduh isterinya berzina dengan empat kali sumpah dan menyatakan bahwa dia adalah termasuk orang yang benar dalam tuduhan, dan pada sumpah kelima disertai pernyataan bahwa ia bersedia menerima laknat/kutukan Allah jika ia dusta dalam tuduhannya. Bila suami melakukan *li'an* kepada isterinya, sedangkan isterinya tidak menerima, maka isteri boleh melakukan sumpah *li'an* juga terhadap suaminya.<sup>6</sup>

e. *Ila'*

*Ila'* ialah bersumpah untuk tidak melakukan suatu pekerjaan. dalam kalangan bangsa arab jahiliyah perkataan *ila'* mempunyai arti khusus dalam hukum perkawinan mereka, yakni suami bersumpah untuk tidak mencampuri isterinya, waktunya tidak ditentukan dan selama itu isteri tidak di-talaq ataupun diceraikan, sehingga kalau keadaan ini berlangsung berlarut-larut, yang menderita adalah pihak isteri karna keadannya terkatung-katung dan tidak ada ketentuan yang pasti.

f. Kematian

Putusnya perkawinan karena kematian, terjadi karena salah satu pihak dalam perkawinan meninggal dunia, apakah itu suami atau isteri, yang lebih dulu ataupun para pihak suami dan isteri secara bersamaan meninggal dunia.

---

<sup>6</sup>Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Bogor: Kencana, 2003), h. 238.

g. Putusan pengadilan

Putusnya perkawinan karena putusan pengadilan ini, sebagaimana ditunjukkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), pasal 114 dan Pasal 115. Menurut pasal 115 menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah pengadilan tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (suami dan isteri).

b. Dasar Hukum dan Hukum Perceraian

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum talak. Pendapat yang lebih benar adalah makruh jika tidak ada hajat yang menyebabkan, karena talak berarti kufur terhadap nikmat Allah, mengkufuri nikmat Allah haram hukumnya. talak tidak halal kecuali darurat, misalnya suami ragu terhadap perilaku isteri atau hati sang suami tidak ada rasa tertarik pada isteri karena Allah Maha membolak balikan segala hati. Jika tidak ada hajat yang mendorong talak berarti kufur terhadap nikmat Allah secara murni dan buruk adab terhadap suami, hukumnya makruh.

Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat tentang hukum talak secara rinci. Menurut mereka hukum talak terkadang wajib dan terkadang halal dan sunnah. Al-Baijarami berkata : “hukum talak ada lima, yaitu adakalanya wajib seperti talaknya orang yang bersumpah ila (bersumpah tidak mencampuri isteri), atau dua utusan dari keluarga suami dan isteri, adakalanya haram seperti talak bit'ah, dan adakalanya sunnah seperti talaknya orang yang lemah, tidak mampu melaksanakan hak-hak

pernikahan. Demikian juga sunnah, talaknya suami yang tidak ada kecenderungan hati kepada isteri, karena perintah salah satu dari dua orang tua yang bukan memberatkan, karena buruknya akhlaknya dan ia tidak tahan hidup bersamanya, tetapi ini tidak mutlak karena umumnya wanita seperti itu.”

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa talak ada kalanya wajib, seperti talaknya dua utusan keluarga yang ingin menyelesaikan perpecahan pasangan suami isteri karena talak inilah satu solusi perpecahan tersebut. Demikian juga talak orang yang sumpah *ila'* (tidak mencampuri isteri) setelah menunggu masa iddah empat bulan sebagai firman Allah:

لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ  
وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٦﴾

Artinya: “Kepada orang-orang yang meng-ila’ isterinya diberi tangguh empat bulan (lamanya). Kemudian jika mereka kembali (kepada isterinya), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS Al-Baqarah(2): 226-227)<sup>7</sup>

Ulama Hanabilah menambahkan, talak haram yakni talak yang bukan karena hajat. Ia digolongkan haram karena merugikan diri suami dan isteri dan melenyapkan maslahat yang diperoleh sepasang suami isteri tanpa ada hajat, keharamannya seperti merusak harta. Dalam riwayat lain macam ini tergolong talak makruh, karena sabda nabi: *Perbuatan Halal yang paling*

<sup>7</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahannya, (Jakarta: Karya Insan Indonesia, 2002), h. 36.

*dibenci Allah adalah talak.* Dalam satu periwayatan: Allah tidak menghalalkan sesuatu yang lebih dibenci dari pada talak. (HR. Abu Dawud)

Sesungguhnya talak dibenci tanpa ada hajat, namun Nabi menyebutnya sebagai barang halal. Dikarenakan talak menghilangkan nikah yang mengandung banyak kemaslahatan yang dianjurkan, maka talak makruh.

Talak mubah adalah talak karena hajat seperti akhlak wanita yang tidak baik, interaksi pergaulannya yang tidak baik dan merugikan. Apabila pernikahan dilanjutkan pun tidak mendapatkan tujuan apa-apa. Talak sunnah adalah talak wanita yang lalai terhadap hak-hak Allah yang wajib dilaksanakan, seperti shalat dan semacamnya dan tidak mungkin memaksanya atau karena wanita yang tidak terpelihara. Imam Ahmad berkata: “ Tidak layak mempertahankan wanita demikian itu karena ia kurang agamanya, tidak aman kerusakan rumah tangga, dan mempersamakan anak yang bukan diperoleh dari suami.” Tidak mengapa mempersempit peluang wanita seperti tersebut sebagai pelajaran.

Pembicaraan tentang beberapa hikmah disyariatkannya talak sebagaimana yang telah kami bicarakan di atas, bahwa Islam memberikan hak talak ini bagi suami karena ia lebih mendorong keabadian pernikahan. Ia korbankan harta benda yang dibutuhkan untuk mencapai jalan ini, bahkan lebih besar dari itu ketika itu talak dan menghendaki menikah dengan wanita lain.

### c. Alasan dan Faktor Penyebab Perceraian

Setidaknya ada empat kemungkinan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga, yang dapat memicu timbulnya keinginan untuk memutus/terputusnya perkawinan<sup>8</sup>.

#### a. Terjadinya nusyuz dari pihak isteri

Nusyus bermakna kedurhakaan yang dilakukan seorang isteri terhadap suaminya. Hal ini terjadi dalam bentuk pelanggaran perintah, penyelewengan dan hal-hal yang dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga. Berkenaan dengan hal ini al-Qur'an memberi tuntunan bagaimanapun mengatasi nusyuz isteri agar tidak terjadi perceraian.

Allah SWT berfirman di dalam surah an-Nisa (4): 34 yang artinya:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ۚ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا  
كَبِيرًا

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu

<sup>8</sup> Ahmad Rafik, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali pers, 1995), h. 269-272.



khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”<sup>9</sup>

Berangkat dari surah an-Nisa (4): 34 al-Quran memberikan opsi sebagai berikut:

- 1) Isteri diberi nasehat dengan cara yang *ma'ruf* agar ia segera sadar terhadap kekeliruan yang diperbuatnya.
- 2) Pisah ranjang. Cara ini bermakna hukuman psikologi bagi isteri dan dalam kesendiriannya tersebut ia dapat melakukan koreksi diri terhadap kekeliruannya.
- 3) Memberi hukuman fisik dengan cara memukulnya. Penting untuk dicatat, yang boleh di pukul hanyalah bagian yang tidak membahayakan si isteri seperti betisnya.

b. Nusyuz suami terhadap isteri

Selama ini sering disalah pahami bahwa nusyuz hanya datang dari pihak isteri saja. Padahal al-Qur'an juga menyebutkan adanya nusyuz dari suami seperti yang terlihat dalam al-Qur'an surah an-Nisa' (4): 128.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahannya, (Jakarta: Karya Insan Indonesia, 2002), h. 84.

<sup>10</sup>*Ibid.*, h. 94.

وَإِنْ أَمْرًا خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ  
يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ  
تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٢٨﴾

Artinya: “Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir, dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”<sup>11</sup>

Kemungkinan nusyuznya suami dapat terjadi dalam bentuk kelalaian dari pihak suami untuk memenuhi kewajiban pada isteri, baik nafkah lahir maupun nafkah batin. Berkenaan dengan tugas suami berangkat dari hadist Rasul SAW., ada dinyatakan, di antara kewajiban suami terhadap isteri adalah:

*Pertama*, memberi sandang dan pangan. *Kedua*, Tidak memukul wajah jika terjadi nusyuz, *ketiga*, tidak mengolok-olok dengan mengucapkan hal-hal yang dibencinya. *Keempat*, tidak menjauhi isteri menghindari isteri kecuali di dalam rumah. Inti hadist ini adalah suami harus memperlakukan isterinya dengan cara yang baik dan dilarang menyakiti isterinya baik lahir maupun batin, fisik dan mental. Jika ini terjadi dapat dikatakan suatu bentuk nusyuz suami kepada isteri.

---

<sup>11</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahannya, (Jakarta: Karya Insan Indonesia, 2002), h. 99.

### c. Terjadinya *Syiqaq*

Terjadinya *syiqaq* suatu keadaan perselisihan suami-isteri, yang dikhawatirkan akan berakibat pecahnya rumah tangga atau putusnya perkawinan, sehingga karena itu, maka diangkatlah dua orang penjurur pendamai (hakam), guna menyelesaikan perselisihan tersebut<sup>12</sup>. Untuk sampai pada kesimpulan bahwa suami isteri tidak dapat lagi didamaikan harus dilalui beberapa proses. Dalam ayat suci al-Qur'an surah an-Nisa'(4): 35 ada dinyatakan:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا

إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

Artinya: “Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam[293] dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”<sup>13</sup>

Dari ayat di atas, jelas sekali aturan Islam dalam menangani problema kericuhan dalam rumah tangga. Dipilihnya *hakam* (arbitrator) dari masing-masing pihak dikarenakan para perantara itu akan lebih mengetahui karakter, sifat keluarga mereka sendiri. Pengangkatan *hakam* yang dimaksud dalam ayat tersebut, terutama bertugas mendamaikan suami istri. Hanya dalam keadaan terpaksa sekali dan sudah sekuat

<sup>12</sup>Sayuti Thalib, *Hukum kekeluargaan Indonesia berlaku bagi Umat Islam*, Buku I, Universitas Indonesia, (Jakarta, Gitama Jaya, 1974), h. 127

<sup>13</sup>Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Mubin (Al-quran dan terjemah)*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-mubin, 2013), h. 84.

tenaga mendamaikan suami istri itu tidak berhasil, maka *hakam* boleh mengambil keputusan menceraikan suami istri tersebut. Menurut suatu riwayat dari imam Syafi'i, “ pernah datang dua orang suami istri kepada Ali r.a dan beserta mereka ikut pula beberapa orang lainnya. Ali menyuruh mereka mengutus seorang hakim. Kemudian berkata kepada keduanya, “ kamu tentu tahu, apa yang wajib kamu lakukan. Apabila kamu berpendapat bahwa kamu dapat mendamaikan mereka, cobalah lakukan. Dan jika kamu berpendapat bahwa keduanya lebih baik bercerai, perbuatlah”.<sup>14</sup>

d. Terjadinya salah satu pihak melakukan perbuatan zina atau *fakhisyah*

Perbuatan ini dapat menimbulkan saling tuduh menuduh antara keduanya. Cara penyelesaiannya adalah membuktikan tuduhan yang didakwakan, dengan cara *li'an* seperti telah disinggung dimuka. *Li'an* sesungguhnya telah memasuki “gerbang” putusnya perkawinan, dan bahkan untuk selama-lamanya, karena akibat *li'an* adalah terjadinya talak *ba'in kubra*<sup>15</sup>. Tawaran penyelesaian yang diberikan al-Qur'an adalah dalam rangka anti sipasi agar *nusyuz* dan *syiqaq* yang terjadi tidak sampai mengakibatkan terjadinya perceraian.

Faktor-faktor penyebab perceraian (cerai gugat) yaitu:

---

<sup>14</sup>Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'i Lengkap Muamalat, Munakahat, Jinayat* ( Jakarta: CV Pustaka Setia, 2000), h. 336.

<sup>15</sup>Ahmad Rofik, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 217.

#### 1. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi, merupakan factor yang paling dominan sebagai penyebab terjadinya cerai gugat. Hal ini disebabkan kurang atau bahkan tidak adanya tanggung jawab suami dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.

#### 2. Percekcokan, penganiayaan dan kekerasan dalam rumah tangga

Penganiayaan dalam rumah tangga menjadi factor yang cukup dominan dalam perkara cerai gugat yang diajukan di pengadilan agama.

#### 3. Adanya wanita lain, perselingkuhan, poligami

Adanya wanita lain, sehingga terjadinya perselingkuhan bahkan ada yang sampai terjadinya poligami termasuk menjadi factor penyebab cerai gugat yang diajukan.

#### 4. Judi dan mabuk-mabukan

Judi dan mabuk-mabukan juga menjadi factor penyebab terjadinya cerai gugat.<sup>16</sup>

#### d. Akibat Perceraian terhadap Istri dan Anak

Perceraian memberikan dampak terhadap anak dan istri, dampak tersebut menimbulkan sebuah peraturan yang mengharuskan setiap pihaknya tidak lepas tanggung jawab terhadap hal-hal yang terjadi setelah perceraian. Berikut ini kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi akibat putusnya perkawinan:

---

<sup>16</sup>Khoirul abrol, Disertasi Doktor: "*Faktor-faktor Penyebab Cerai Gugat dan Dampaknya serta Upaya Solusinya*", (Bandar Lampung: Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2018), h. 185-186



a. Akibat talak

Menurut ketentuan pasal 149 KHI dinyatakan sebagai berikut:

- 1) Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qabla al-dukhul*
- 2) Memberi nafkah, maskan dan kiswah (tempat tinggal dan pakaian) kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak *ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil
- 3) Melunasi mahar yang masih terutang seluruhnya dan separuh apabila *qabla al-dukhul*
- 4) Memberikan biaya hadlanah (pemeliharaan, termasuk didalamnya biaya pendidikan) untuk anak yang belum mencapai 21 tahun.

b. Akibat perceraian (cerai gugat)

Akibat perceraian karena cerai gugat diatur dalam Pasal 156

Kompilasi Hukum Islam:

- a. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadlanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
  - a) Wanita-wanita dalam garis ibu
  - b) Ayah
  - c) Wanita-wanita dalam garis lurus keatas dari ayah
  - d) Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan
  - e) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu

- f) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah
- b. Anak yang sudah mumayyiz berhak untuk memilih mendapatkan hadlanah dari ayah atau ibunya.
- c. Apabila pemegang hadanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadlanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan pengadilan dapat memindahkan hak hadlanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadlanah pula.
- d. Semua biaya hadlanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri.
- e. Bila mana terjadi perselisihan mengenai hadlanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), (c), dan (d).
- f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

c. Akibat *Khulu'*

Pasal 161 kompilasi menjelaskan bahwa “perceraian dengan jalan *khulu'* mengurangi jumlah talak dan tak dapat dirujuk”. Menurut Ibn Rusyd, *khulu'* itu khusus bagi pemberian isteri untuk semua yang telah

diberikan suami kepadanya.<sup>17</sup> Menurut mayoritas (jumhur) ulama, termasuk Imam Empat, suami apabila telah mengkhulu' isterinya, maka isteri itu bebas, dan semua urusannya terserah kepadanya, dan tidak boleh lagi suami rujuk kepadanya, karena pihak isteri telah memberikan hartanya untuk membebaskan dirinya dari perkawinan.

d. Akibat *Li'an*

Pasal 162 kompilasi menjelaskan, “Bilamana *li'an* terjadi maka perkawinan itu putus untuk selamanya dan anak yang di kandung di nasabkan kepada ibunya, sedang suaminya terbebas dari kewajiban memberi nafkah”. Karena terputusnya hubungan pewarisannya pun hanya dapat terjalin dengan ibu dan keluarga ibunya saja.

e. Akibat Ditinggal Mati Suami

Apabila meninggal, maka si isteri selain menjalani masa tunggu seperti yang akan diuraikan nanti ia berhak mewarisi harta peninggalan si suami, dan sekaligus berkewajiban memelihara anak-anaknya.

## 2. Perceraian Menurut Hukum Positif

a. Pengertian dan Dasar Hukum Perceraian

Perceraian ialah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.<sup>18</sup> Perceraian menurut bahasa Indonesia berarti “pisah” dari kata dasar “cerai”. Menurut istilah

---

<sup>17</sup>Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, juz 2, (Semarang: Usaha Keluarga.), h. 66.

<sup>18</sup>Subekti, “*Pokok-pokok Hukum Perdata*”, *Maqasid Jurnal Studi Hukum Islam* Vol. 6. No. 1. 2017

perceraian merupakan sebutan untuk melepaskan ikatan pernikahan.<sup>19</sup> Menurut A. Fuad Sa'id yang dimaksud dengan perceraian adalah putusnya perkawinan antara suami-istri karena tidak ada kerukunan dalam rumah tangga atau sebab lain, seperti mandulnya istri atau suami dan setelah diupayakan perdamaian dengan melibatkan keluarga kedua belah pihak.

Perceraian merupakan bagian dari perkawinan, sebab tidak ada perceraian tanpa adanya perkawinan terlebih dahulu. Perkawinan merupakan awal dari hidup bersama antara seorang pria dan wanita sebagai suami-isteri, sedangkan perceraian merupakan akhir dari kehidupan bersama suami isteri tersebut. Setiap orang menghendaki agar perkawinan yang dilakukannya tetap utuh sepanjang masa kehidupannya. Dari definisi di atas, jelas bahwa perceraian merupakan sebuah institusi yang digunakan untuk melepaskan sebuah ikatan perkawinan. Dengan demikian ikatan perkawinan sebenarnya dapat putus dan tata caranya telah diatur baik maupun di dalam UU perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang selanjutnya disebut UUP dengan semena-mena seperti yang terjadi sekarang ini.<sup>20</sup>

b. Alasan untuk melakukan perceraian

Mengenai alasan-alasan terjadinya perceraian menurut PP No 9 Tahun 1975 adalah:<sup>21</sup>

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.

---

<sup>19</sup>Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar*, (Surabaya: Bina Imam, 1993), juz. 11, h. 175

<sup>20</sup>F.X. Suhardana, *Hukum Perkawinan*, (Jakarta: Penerbit Prenhalindo, 2001), h. 102.

<sup>21</sup>Wati Rahmi Ria, Muhammad Zulfikar, *Ilmu Hukum Islam*, (Bandar Lampung: Sinar Sakti, 2015, h. 61-62

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri.
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Dalam kompilasi terhadap tambahan alasan terjadinya perceraian yang khusus, berlaku bagi pasangan perkawinan yang memeluk agama islam, yaitu:

- a. Suami melanggar taklik talak
- b. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.<sup>22</sup>

Selanjutnya pada pasal 39 UUP dinyatakan:

- a. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

---

<sup>22</sup> Zinuddin Ali. *Hukum perdata islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika. 2009). h. 74-75.



- b. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.
- c. Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundangan sendiri.

Berangkat dari pasal 116, ada tambahan dua sebab perceraian dibanding dengan pasal 19 PP 9 Tahun 1975 yaitu suami melanggar taklik talak dan murtad. Tambahan ini relatif panjang karena sebelumnya tidak ada. Taklik talak adalah janji atau pernyataan yang biasanya dibacakan suami setelah akad nikah. Kalau suami melanggar “janji” yang telah diucapkan dan isterinya tidak rela lantas mengadu ke pengadilan, maka pengadilan atas nama suami akan menjatuhkan talak satu khuluk kepada isteri. UUP tidak menyinggung murtad sebagai alasan perceraian dan di dalam KHI, murtad dijadikan alasan perceraian. Artinya jika salah satu keluar dari agama islam, maka suami atau isteri dapat mengajukan permohonan cerai kepada pengadilan.

#### c. Prosedur Perceraian

Langkah-langkah yang harus dilakukan Pemohon (Suami) atau Kuasanya:

- a. Mengajukan permohonan secara tertulis atau lisan kepada pengadilan agama/mahkamah syar’iyah (Pasal 118 HIR, 142 R.Bg jo Pasal 66 UU No. 7 Tahun 1989);

- b. Pemohon dianjurkan untuk meminta petunjuk kepada pengadilan agama/mahkamah syar'iah tentang tata cara membuat surat permohonan (Pasal 119 HIR, 143 R.Bg jo. Pasal 58 UU No. 7 Tahun 1989);
- c. Surat permohonan dapat dirubah sepanjang tidak merubah posita dan petitum. Jika Termohon telah menjawab surat permohonan ternyata ada perubahan, maka perubahan tersebut harus atas persetujuan termohon.

Permohonan tersebut diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syar'iah:

- a. Yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon (Pasal 66 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989);
- b. Bila termohon meninggalkan tempat kediaman yang telah disepakati bersama tanpa izin pemohon, maka permohonan harus diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syar'iyah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman pemohon (Pasal 66 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989)
- c. Bila termohon berkediaman di luar negeri, maka permohonan diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syar'iyah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman pemohon (Pasal 66 ayat (3) UU No. 7 Tahun 1989);
- d. Bila pemohon dan termohon bertempat kediaman di luar negeri, maka permohonan diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syar'iyah yang daerah hukumnya meliputi tempat dilangsungkannya perkawinan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat (Pasal 66 ayat (4) UU No. 7 Tahun 1989).

Permohonan tersebut memuat :

- a. Nama, umur, pekerjaan, agama dan tempat kediaman pemohon dan termohon;
- b. Posita (fakta kejadian dan fakta hukum);
- c. Petitum (hal-hal yang dituntut berdasarkan posita).
- d. Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak atau sesudah ikrar talak diucapkan (Pasal 66 ayat (5) UU No. 7 Tahun 1989).
- e. Membayar biaya perkara (Pasal 121 ayat (4) HIR, 145 ayat (4) R.Bg. Jo Pasal 89 UU No. 7 Tahun 1989), bagi yang tidak mampu dapat berperkara secara cuma-cuma (prodeo) (Pasal 237 HIR, 273 R.Bg).

Proses Penyelesaian Perkara:

1. Pemohon mendaftarkan permohonan cerai talak ke pengadilan agama/mahkamah syar'iyah.
2. Pemohon dan termohon dipanggil oleh pengadilan agama/mahkamah syar'iah untuk menghadiri persidangan.
3. Tahapan persidangan :
  - a. Pada pemeriksaan sidang pertama, hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak, dan suami istri harus datang secara pribadi (Pasal 82 UU No. 7 Tahun 1989);

- b. Apabila tidak berhasil, maka hakim mewajibkan kepada kedua belah pihak agar lebih dahulu menempuh mediasi (Pasal 3 ayat (1) PERMA No. 2 Tahun 2003);
- c. Apabila mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan, jawaban, jawab menjawab, pembuktian dan kesimpulan. Dalam tahap jawab menjawab (sebelum pembuktian) Termohon dapat mengajukan gugatan rekonsvensi (gugat balik) (Pasal 132 a HIR, 158 R.Bg);
- d. Putusan pengadilan agama/mahkamah syar'iyah atas permohonan cerai talak sebagai berikut :
  - a. Permohonan dikabulkan. Apabila termohon tidak puas dapat mengajukan banding melalui pengadilan agama/mahkamah syar'iyah tersebut.
  - b. Permohonan ditolak. Pemohon dapat mengajukan banding melalui pengadilan agama/mahkamah syar'iyah tersebut.
  - c. Permohonan tidak diterima. Pemohon dapat mengajukan permohonan baru.
- e. Apabila permohonan dikabulkan dan putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka :
  - a. Pengadilan agama/mahkamah syar'iah menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak;
  - b. Pengadilan agama/mahkamah syar'iah memanggil Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan ikrar talak;

- c. Jika dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan sidang penyaksian ikrar talak, suami atau kuasanya tidak melaksanakan ikrar talak didepan sidang, maka gugurlah kekuatan hukum penetapan tersebut dan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan hukum yang sama (Pasal 70 ayat (6) UU No. 7 Tahun 1989).
- 6. Setelah ikrar talak diucapkan panitera berkewajiban memberikan Akta Cerai sebagai surat bukti kepada kedua belah pihak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah penetapan ikrar talak (Pasal 84 ayat (4) UU No. 7 Tahun 1989).
- d. Akibat Perceraian terhadap Istri dan Anak

Dalam pasal 38 UU Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas keputusan pengadilan. Selanjutnya menurut ketentuan pasal 41 UUP: Akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak-anak, bila mana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberikan keputusannya.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut. Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isterinya.

### 3. Komunikasi dalam Keluarga

#### a. Pengertian Komunikasi dalam keluargaan

Perkataan komunikasi berasal dari kata *communicare* yang di dalam bahasa latin mempunyai arti berpartisipasi, atau berasal dari kata *commons* yang berarti sama=*common*.<sup>23</sup> Istilah komunikasi dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami.<sup>24</sup>

Menurut Suharsimi Arikunto dalam bukunya “*organisasi dan Administrasi*”, komunikasi adalah suatu proses dimana pesan disampaikan oleh penyampai pesan kepada penerima. Pesan itu dapat berupa perasaan atau hasil pemikiran sendiri, atau hanya penerusan dari perasaan atau hasil pemikiran orang lain, dengan maksud untuk mengubah pengetahuan, keterampilan dan atau sikap fihak penerima pesan.<sup>25</sup>

Sedangkan keluarga menurut Kusdwiratri Setiono adalah kelompok orang yang ada hubungan darah atau perkawinan. Orang-orang yang termasuk keluarga adalah ibu, bapak dan anak-anaknya. Menurut

---

<sup>23</sup>Toto Tasmara, *Komunikasi Dakwah*, Jurnal Komunikasi Volume. 3. No. 1. 2017, h. 3.

<sup>24</sup>Depdikbud RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pusaka, 2005), h. 585.

<sup>25</sup>Suharsini Arikunto, *Organisasi Dan Administrasi*, (Jakarta: Grafindo Persada, 1993), h.207.

Soeleman yang dikutip Moh. Shohib dalam bukunya “*pola asuh orang tua*”, keluarga adalah sekumpulan orang yang hidup bersama dalam tempat tinggal bersama dan masing-masing anggota merasakan adanya pertautan batin sehingga terjadi saling mempengaruhi, saling memperhatikan, dan saling menyerahkan diri.<sup>26</sup>

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa komunikasi dalam keluarga merupakan kegiatan atau proses penyaluran informasi, perasaan, ide, antara anggota keluarga yang satu dengan anggota keluarga yang lain.

b. Proses Komunikasi

Menurut Onong Uchjana, bahwa proses komunikasi terbagi menjadi dua tahap, yaitu secara primer dan sekunder.

a. Komunikasi secara primer

Yaitu proses penyampaian pikiran atau perasaan seseorang kepada orang lain dengan menggunakan lambang atau simbol sebagai media. Lambang sebagai media primer dalam proses komunikasi adalah bahasa, (kial), isyarat, gambar, warna, yang secara langsung mampu menerjemahkan pikiran dan perasaan komunikator kepada komunikan.

b. Proses komunikasi secara sekunder

Yaitu proses penyampaian pesan oleh seseorang kepada orang lain dengan menggunakan sarana sebagai media kedua setelah memakai

---

<sup>26</sup>Moh. Shohib, *Pola Asuh Orang Tua*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1998), h. 17.



lambang sebagai media pertama. Proses komunikasi ini dipakai karena komunikasi berada di tempat jauh, medianya adalah telepon, surat.<sup>27</sup>

Dalam proses komunikasi terdapat lima unsur penting yang harus diperhatikan, yaitu:

- 1) *Sender*, yaitu pihak yang mengirim pesan atau berita disebut juga komunikator.
- 2) *Message*, adalah pesan atau informasi yang hendak disampaikan kepada pihak lain.
- 3) *Medium*, adalah sarana penyaluran pesan-pesan (media).
- 4) *Receive*, adalah pihak penerima pesan atau informasi.
- 5) *Response*, adalah tanggapan atau reaksi komunikan terhadap pesan atau informasi yang diterima dari pihak komunikator.

#### c. Tujuan Komunikasi

Pada dasarnya komunikasi bertujuan untuk memberikan informasi, mendidik dan menerangkan informasi bahkan menghibur komunikan, agar komunikan terpengaruh dan berubah sifat sesuai dengan kehendak komunikator dan untuk mempengaruhi tingkah laku si penerima informasi yang dinyatakan dalam tindakan-tindakan tertentu sebagai respons terhadap informasi yang diterimanya.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup>Onong Uchjana Effendi, *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktik*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2001), h. 11-16

<sup>28</sup>Hadari Nawawi, *Administrasi Pendidikan*, (Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1997), h.

Menurut Stanton yang dikutip Ali Liliweri dalam bukunya “*Komunikasi serba ada serba makna*” mengatakan bahwa sekursngkurangnya ada lima tujuan komunikasi manusia, yaitu:

- 1) Mempengaruhi orang lain.
- 2) Membangun atau mengelola relasi antar personal.
- 3) Menemukan perbedaan jenis pengetahuan.
- 4) Membantu orang lain.
- 5) Bermain atau bergurau.<sup>29</sup>

Dengan demikian tujuan komunikasi sebenarnya adalah untuk mencapai pengertian bersama, sesudah itu mencapai persetujuan mengenai suatu pokok ataupun masalah yang merupakan kepentingan bersama. Dengan kondisi yang demikian akan terjalin hubungan yang harmonis dan saling mengerti satu sama lain dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama. Dalam Islam komunikasi juga bisa dijadikan media untuk ibadah yaitu dengan cara berlaku baik atau berbuat kebajikan kepada sesama manusia, alam maupun Tuhan.

#### d. Macam-macam Komunikasi

Joseph A. Devito seorang profesor komunikasi di City University of New York dalam bukunya *Communicology* (1982) membagi komunikasi atas empat macam, yakni komunikasi antar pribadi, komunikasi kelompok kecil, komunikasi publik dan komunikasi massa.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Alo Liliweri, *Komunikasi Serba Ada Serba Makna*, (Jakarta: Kencana, 2011) h. 128

<sup>30</sup> Hafied Cangara, *Pengantar Ilmu Komunikasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 29-30

### 1) Komunikasi Antar Pribadi

Menurut Devito yang dikutip Alo Liliweri dalam bukunya “*Komunikasi Antar Pribadi*”, komunikasi antar pribadi merupakan pengiriman pesan dari seseorang dan diterima oleh orang lain dengan efek dan umpan balik yang langsung. Ciri komunikasi antar pribadi, yaitu: (a) spontanitas, terjadi sambil lalu dengan media utama adalah tatap muka, (b) tidak mempunyai tujuan yang ditetapkan terlebih dahulu, (c) terjadi secara kebetulan di antar peserta yang identitasnya kurang jelas, (d) mengakibatkan dampak yang tidak disengaja dan tidak disengaja, (e) keraf kali berbalas-balasan, (f) mempersyaratkan hubungan paling sedikit dua orang dengan hubungan yang bebas dan bervariasi, ada keterpengaruhan, (g) harus membuahkan hasil, dan (h) menggunakan lambang-lambang yang bermakna.<sup>31</sup>

### 2) Komunikasi kelompok kecil

Komunikasi kelompok kecil (small/micro group communication) adalah komunikasi yang ditunjukkan kepada kognisi komunikan prosesnya berlangsung secara dialogis.

Dalam komunikasi kelompok kecil komunikator menunjukkan pesannya kepada benak atau pikiran komunikan, misalnya kuliah, ceramah, diskusi, seminar, rapat, dan lain-lain. Dalam situasi komunikasi seperti itu logika berperan penting. Komunikan akan dapat menilai logis tidaknya uraian komunikator.

---

<sup>31</sup> Alo Liliweri, *Komunikasi Anta Pribadi*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997), h. 12.

Ciri yang kedua dari komunikasi kelompok kecil ialah bahwa prosesnya secara dialogis, tidak linear, melainkan sirkular. Umpan balik terjadi secara verbal. Komunikasi dapat menanggapi uraian komunikator, bisa bertanya jika tidak mengerti, dapat menyanggah bila tidak setuju, dan lain sebagainya.<sup>32</sup>

### 3) Komunikasi publik

Komunikasi bisa disebut komunikasi pidato, komunikasi kolektif, komunikasi retorika, public speaking dan komunikasi khalayak (audience communication). Adapun namanya, komunikasi publik menunjukkan suatu proses komunikasi dimana pesan-pesan disampaikan oleh pembicara dalam situasi tatap muka di depan khalayak yang lebih besar.

Dalam komunikasi publik penyampaian pesan berlangsung secara kontinu. Dapat didefinisikan siapa yang berbicara (sumber) dan siapa pendengarnya. Interaksi antara sumber dan penerima sangat terbatas, sehingga tanggapan balik juga terbatas. Hal ini disebabkan karena waktu yang digunakan sangat terbatas, dan jumlah khalayak sangak relatif besar.

### 4) Komunikasi Massa

Yang dimaksud komunikasi massa adalah komunikasi melalui media massa misalnya: surat kabar, majalah, radio, televisi, film. Komunikasi massa mempunyai beberapa ciri-ciri diantaranya:

a) Komunikasi massa berlangsung satu arah.

---

<sup>32</sup>Onong Uchjana Effendy, *Ilmu Teori dan Filsafat Komunikasi*, (Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), h. 76-77.

- b) Pesan pada komunikasi massa lembaga.
- c) Komunikasi massa bersifat heterogen.
- d) Pesan pada komunikasi massa bersifat umum.

### **A. Tinjauan Pustaka**

Dalam penulisan skripsi ini peneliti menggali informasi dari penelitian-penelitian sebelumnya sebagai bahan perbandingan, baik mengenai kekurangan atau kelebihan yang sudah ada. Selain itu, peneliti jugamenggali informasi dari buku-buku maupun skripsi dalam rangka mendapatkan suatu informasi yang ada sebelumnya tentang teori yang berkaitan dengan judul yang digunakan untuk memperoleh landasan teori ilmiah.

1. Skripsi Harits Widiyanto, Mahasiswa Universitas Jember Fakultas Hukum Tahun 2012 dengan Judul “Tinjaun Alimentasi Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian Menurut Undang Nomor 1 Tahun 1974”.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum digunakan dalam ilmu hukum untuk menentukan hukum. Hasil penelitian ini menyimpulkan suatu perceraian akan membawa berbagai akibat hukum salah satunya adalah berkaitan dengan alimentasi, Hak alimentasi dilindungi oleh hukum dan undang-undang, hal mana dapat diketahui melalui rumusan pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya memelihara dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataanya tidak memberikan kewajiban

tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa bapak dalam kenyataannya tidak memberikan kewajiban tersebut.

2. Skripsi Marlina, Mahasiswa UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Fakultas Syari'ah dan Hukum Tahun 2017 dengan judul “ Perceraian Karena Cemburu Analisa Putusan Mahkamah Syar'iyah Tapak Tuan”.

Peneliti melakukan penelitian kepustakaan (*library research*). Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis melalui metode analisis deskriptif.

Adapun hasil yang ditemukan terkait pertanyaan tersebut bahwa pertimbangan hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan yaitu melihat pada terpenuhinya syarat formil dan syarat materil. Dilihat dari syarat formil, hakim memandang kasus perceraian telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Dilihat dari syarat materil, hakim memandang bahwa adanya kesesuaian antara gugatan dan permohonan dengan keterangan saksi, sehingga hakim secara materil dapat membuktikan kebenaran gugatan dan permohonan yang diajukan. Adapun tinjauan hukum Islam terhadap putusan Mahkamah Syar'iyyah Tapak Tuan tersebut bahwa, dilihat dari sisi hukum islam, putusan Mahkamah Syar'iyyah Tapak Tuan secara umum telah tepat. Di mana hakim tidak menekan sebab perceraian pada kecemburuannya, tetapi lebih kepada sisi pertengkaran suami isteri yang dalam Islam disebut dengan syiqaq yang terjadi terus menerus, sehingga tujuan pernikahan tidak lagi dapat diwujudkan.





## DAFTAR PUSTAKA

- Abror, Khoirul, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, Cetakan Kedua, Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2016
- ....., *Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur*, Yogyakarta: DIVA Press, 2019
- ....., Disertasi Doktor: "*Faktor-faktor Penyebab Cerai Gugat dan Dampaknya serta Upaya Solusinya*", Bandar Lampung: Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2018
- Al-Husaini, Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad, *Kifayatul Akhyar*, Surabaya: Bina Imam, 1993
- Ali, Zinuddin. *Hukum perdata islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika. 2009
- al-Jamal, Ibrahim Muhammad, *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah*, Terj. Ansori Umar Sitanggal "Fiqh Wanita", Semarang: CV Asy- Syifa, 1986
- Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* Balai Pustaka, Jakarta, 2006
- Arikunto, Suharsini, *Organisasi Dan Administrasi*, Jakarta: Grafindo Persada, 1993
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Pernikahan Islam*, Yogyakarta: UII Pres, 2004
- Cangara, Hafied, *Pengantar Ilmu Komunikasi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002
- Cholid Narbuko, Abu Ahmad, *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007
- ....., Abu Ahmad, *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007

Dapartemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Karya  
Insan Indonesia, Jakarta, 2002

Dapertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*,  
Edisi Keempat Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Jakarta:  
Karya Insan Indonesia, 2002

Depdikbud RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pusaka, 2005

Effendi, Onong Uchjana, *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktik*, Bandung: PT  
Remaja Rosda Karya, 2001

Ghozaly, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Bogor: Kencana, 2003

....., *Fiqh Munakahat*, Cetakan Ketiga, Kencana Prenada Media Group, Jakarta,  
2008

Hadi, Sutrisno, *Metode Research*, Andy Offset, Yogyakarta 1997

Kautur, Ranny, *Metode Penelitian untuk Penelitian Skripsi dan Tesis*, Taruna  
Grafika, Bandung, 2000

Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Mubin (Al-quran dan terjemah)*,  
Jakarta Timur: Pustaka Al-mubin, 2013

Liliweri, Alo, *Komunikasi Serba Ada Serba Makna*, Jakarta: Kencana, 2011

Mertokusumo, Soedikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Liberty,  
1999

Moleong, Lexi. J., *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung,  
2002

Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004

....., *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cetakan X, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015

Nawawi, Hadari, *Administrasi Pendidikan*, Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1997

Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Sumur, Bandung, 1991

Ramli, Ahmad Fathoni, *Administrasi Peradilan Agama*, Mandar Maju, Bandung, 2013

Rasjidi , Lili, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian Di Malaysia Dan Indonesia*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 1991

Rofik , Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali pers, 1995

....., *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015

....., *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Edisi Revisix, PTRaja Grafindo, Jakarta, 2013

....., *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, 2001

Romli, Dewani, *Fiqh Munaqahat*, Cetakan Pertama, Nur Utovi Jaya, Bandar Lampung, 2009

Rusyd, Ibn, *Bidayah al-Mujtahid*, juz 2, Semarang: Usaha Keluarga

S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistic Kualitatif*, Tarsio, Bandung 1998

Saleh, K. Wanjik, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 1996

Shidiq, Umay M. Dja'far, *Indahnya Keluarga Sakinah dalam Naungan Alqur'an dan Sunnah*, Zakia Press, Jakarta, 2004

Shohib, Moh., *Pola Asuh Orang Tua*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1998

Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat II*, Bandung: CV. Pustaka Setia 1999

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 1982

....., *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 1982

Sri Soesilowaty Mahdi, Surini Ahlan Sjarief dan Akhmad Budi Cahyono, *Hukum Perdata (Suatu Pengantar)*, Jakarta: Gitama Jaya, 2005

Srif, Syamsudin, dkk, *Wanita dan Keluarga Citra Sebuah Peradaban*, Lembaga kajian dan pengembangan Al-Insan, Jakarta, 2006

Suhardana, F.X., *Hukum Perkawinan*, Jakarta: Penerbit Prenhalindo, 2001

Suryabrata, Sumadi, *Metedologi Penelitian*, Rajawali Pers, Yogyakarta, 1983

Syarifudin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2006

Tasmara, Toto, *Komunikasi Dakwah*, Jakarta: Gaya Pratama, 1997

Thalib, Sayuti, *Hukum kekeluargaan Indonesia berlaku bagi Umat Islam*, Buku I, Universitas Indonesia, Jakarta, Gitama Jaya, 1974

Wati Rahmi Ria, Muhammad Zulfikar, *Ilmu Hukum Islam*, Bandar Lampung: Sinar Sakti, 2015